



BPK Gelar Pemeriksaan Pendahuluan

GIANYAR - Meski baru saja menyanggah predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah. Ternyata tidak serta merta membuat Gianyar santai. Hal ini tak lepas dari proses pemeriksaan pendahuluan yang kembali dilaksanakan BPK RI sepanjang hari kemarin (31/7) di Pemkab Gianyar.

Sekkab Gianyar Ida Bagus Gaga Adi Saputra yang ditemui se usai menerima tim pengawas BPK sore kemarin, mengaku menyambut baik pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan pihak BPK RI. Sebab pemeriksaan kemarin juga menjadi upaya mengimplementasikan standar akuntansi pemerintah (SAP) yang berbasis akrual. Hal yang dia akui sudah menjadi komitmen Pemkab Gianyar, dalam upaya pengelolaan keuangan daerah. Oleh karenanya, dia pun berharap dalam pertemuan kemarin, bisa dimanfaatkan semua SKPD di Gianyar. Terlebih dalam pertemuan sehari itu, secara langsung dihadiri semua SKPD (satuan kerja perangkat daerah), camat, termasuk para bendahara di masing-masing SKPD.

"Karena itu, dalam proses pemeriksaan pendahuluan ini. Kami berharap tim dari BPK RI, sekaligus memberikan bimbingan dan arahan kepada aparaturnya Pemkab Gianyar. Supaya mereka ini bisa mempersiapkan diri dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual tersebut," ujarnya. Pria ini menambahkan, dalam upaya menenuhi implementasi SAP itu. Beberapa langkah pun telah dilakukan, seperti mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan. Karena hal itu selain meningkatkan penerapan SAP, sekaligus mempertahankan predikat WTP dalam pengelolaan keuangan yang berhasil diraih Gianyar periode 2014. "Komitmen ini pun tidak hanya didukung Bupati, tapi juga DPRD Gianyar. Karena bagaimana pun hal ini merupakan langkah membuat Gianyar menjadi lebih baik, terutama dalam setiap perencanaan penganggaran," sebut dia. (wid/gup)

Edisi : Sabtu, 1 Agustus 2015

Hal. : 29



Gudang Farmasi Diskes

Terbakar

Obat-obatan Ludes, Kerugian Miliaran

AMLAPURA - Gudang farmasi atau tempat penyimpanan obat-obatan di Kantor Dinas Kesehatan (Diskes) Karangasem, mengalami kebakaran, Jumat (31/7) sore. Belum bisa dipastikan, penyebab kebakaran gudang obat di Kantor Diskes, Jalan A.Yani Amlapura, Lingkungan Galiran, Kelurahan Subagan, Karangasem, itu. Yang jelas, sekitar pukul 15.30, enam orang pegawai Diskes yang sedang lembur nyortir obat kadaluwarsa, mendengar suara letupan di tengah gudang. "Karena suaranya kecil, kami sempat santai saja. Malah sempat bercanda. Bilang teman yang

kentut," tutur I Gusti Agung Candra Wati, salah satu pegawai Diskes Karangasem, yang ikut lembur kemarin.

Tak berselang lama, asap mengepul di tengah gudang

tersebut. Hingga mereka pun berusaha meminta pertolongan, sambil berusaha menyelamatkan barang di dalam gudang itu. Salah satunya, tabung gas oksigen berukuran besar.



KADEK MERTAWAN/RADAR BALI

SEMPROT: Petugas pemadam kebakaran Karangasem berjibaku memadamkan api dari yang berkobar di gudang farmasi Diskes Karangasem.

"Karena khawatir meledak, kami keluarkan semua tabungnya," imbuh pegawai lainnya, I Gusti Agung Ayu Trisna Rini, 20. Mereka menuturkan, kerja lembur itu, dijadwalkan hingga pukul 16.00. Total pegawai lembur kemarin, ada tujuh orang. Namun, saat kebakaran terjadi, satu orang sedang keluar kantor. "Lemburnya nyortir obat kadaluwarsa, untuk persiapan pemusnahan," kata Candra Wati.

Pantauan koran ini, petugas pemadam kebakaran dari Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran Karangasem, yang dipimpin Kepala Dinasanya, I Wayan Sutapa, terlihat kesulitan mengatasi kebakaran itu. Karena, nyaris tak terlihat api dari luar ruangan, namun asap terus mengepul, dengan

bau khas obat-obatan. "Belum tahu penyebabnya," ujar Kapolsek Kota Karangasem Kompol Anwar Sasmito di lokasi.

Kadiskes Karangasem IGM Tirtayana, akui tak ada obat yang bisa diselamatkan, kecuali beberapa tabung gas oksigen. Akibat kejadian itu, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. "Kerugian obat saja sekitar Rp 2 miliar, itu belum termasuk bangunan," terang Tirtayana. Pihaknya juga menegaskan, stok obat-obatan itu, untuk menyuplai semua Puskesmas di Kabupaten Karangasem. Agar tidak terjadi krisis obat, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. "Kami sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi," pungkaskan Tirtayana. (wan/gup)



ANOM SUARDANA/RADAR BALI

PELANGGARAN:
Mobdin di DPRD Bangli yang menggunakan nopol warna hitam.

Mobdin Diganti Nopol Hitam

BANGLI - Mobil dinas (mobdin) yang semestinya menggunakan nomor polisi (nopol) berwarna merah. Kini banyak diganti dengan nopol berwarna hitam. Seperti mobdin yang terparkir di belakang Jantor DPRD Bangli, Jumat (31/7)

siang kemarin.

Dua mondin Toyota Avanza yang semestinya dipasang nopol merah, tampak dipasang nopol hitam. Yakni DK 73 P dan DK 74 P. Namun saat Sekretaris DPRD Bangli AA Panji Awatarayana dikonfirmasi wartawan, dia mengaku kurang tahu ada mobdin yang dipasang nopol hitam itu. Menurutnya di DPRD Bangli ada delapan unit mobdin untuk kelengkapan dewan yang semestinya menggunakan nopol merah. Hanya mobdin pimpinan dewan saja yang boleh menggunakan nopol hi-

tam. "Soal dua mobil dinas yang bernopol hitam itu memang sudah ada sejak dulu sebelum saya menjadi Sekwan," kilahnya.

Dikonfirmasi terpisah Kanit Regident Satlantas Polres Bangli Iptu Krisna Aji Perkasa mengatakan tidak semua mobdin nopolnya bisa diganti dengan nopol hitam. Yang boleh hanya beberapa pejabat saja. Seperti bupati, wakil bupati, dan lainnya. "Bila ada mobnas DPRD selain ketua DPRD kami belum pernah menerima pengajuan izin penggantian plat nopol. Sehingga kendaraan itu melanggar ketentuan," jelasnya. (nom/gup)

Edisi : Sabtu, 1 Agustus 2015

Hal. : 29



PMH-Kerugian Negara Ditemukan

Dugaan Korupsi Perdin di Pemkot

DENPASAR - Kasus dugaan korupsi Perjalanan Dinas Pemkot Denpasar, sepertinya sudah pasti naik penyidikan. Bahkan, kemarin (31/7) pihak Kejari Denpasar sudah memastikan bahwa, kasus Perdin ini sudah ada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan kerugian negara. Tinggal ekspose atau gelar perkara, kasus ini akan naik ke penyidikan.

Menurut informasi di internal Kejari Denpasar, kasus korupsi Perdin Pemkot Denpasar sudah kelar hasil konsultasi dengan BPKP.

"Sudah. Hasil konsultasi dengan BPKP sudah keluar. Sudah dipastikan ada kerugian negara dan ada perbuatan melawan hukum (PMH)," jelasnya.

Dikonfirmasikan ke Kasi Intel Kejari Denpasar Syahrir Sagir membenarkan, memang kasus Perdin sudah hampir kelar di tingkat penyidikan. Dia mengatakan, hasil konsultasi dengan BPKP sudah turun cukup lama. "Sudah cukup lama dapat hasil konsultasi dengan BPKP," ungkapinya.

Terkait adanya indikasi ker-

ugian negara dan PMH, dia memastikan sudah dipastikan ada kerugian negara dan PMH. "Kalau PMH sudah ada, sudah dipastikan ada PMH. Kemudian kerugian negara juga sudah, sudah dipastikan ada kerugian negara," jelasnya.

Namun sayang, Syahrir enggan memberikan penjelasan detail terkait jumlah. Dia mengatakan, bahwa penyelidikan tidak boleh menyebut angka. "Adalah, cukup besar juga kerugian negaranya," imbuhnya. Dia mengatakan dalam waktu dekat akan dilengkapi secara detail, untuk nantinya bisa dilakukan ekspose. "Setelah ekspose naik ke penyidikan, dan dilanjutkan nanti oleh Pidsus yang meneruskan penyidikannya," urainya.

Artinya sudah ada calon tersangka? "Kami tidak bisa menjelaskan tersangka sebelum penyidikan," pungkasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, terkait dengan permainan perjalanan dinas Pemkot Denpasar didapatkan data, bahwa realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 432.473.819.954 (Rp 432 miliar lebih) atau realisasi 90,11 persen dari anggaran sebesar Rp 479.965.974.075 (Rp 479 miliar lebih). (art/han)



Sertifikat Gabeng, Warga Tanah Ampo Protes

AMLAPURA - Selain belum bisa difungsikan, keberadaan Dermaga Cruise Tanah Ampo, di Desa Tanah Ampo, Kecamatan Manggis, Karangasem, juga masih bermasalah di penyertifikatan lahan warga, pasca pembebasan lahan oleh Pemkab Karangasem. Saat pembangunan dermaga tanah ampo, tahun 2008 lalu, banyak lahan warga dijadikan jalan raya yang panjangnya 1,2 kilometer, dan lebar 12 meter. Bendesa Adat Tanah Ampo, I Gede Suyadnya, menyebutkan, sertifikat tanah warga yang akan dipecah akibat pembebasan lahan oleh pemerintah, hingga kini tidak ada kejelasan, alias gabeng. Saat pembebasan lahan itu, Pemkab Karangasem, yang saat itu dipimpin I Wayan Geredeg selaku Bupati Karangasem, berjanji bakal membantu penyertifikatan sisa lahan yang digunakan jalan raya. Cuma, tujuh tahun berlalu, tak ada kepastian dari Pemkab Karangasem. Sehingga, jalan menuju Dermaga Tanah Ampo, masih tercatat milik masing-masing warga, karena masih tercantum di sertifikat pemilik lahan. Otomatis, selama tujuh tahun berlalu, pajak lahan yang sudah dijadikan jalan raya itu ditanggung masyarakat. "Jelas warga dirugikan, pemerintah tidak memenuhi janjinya, akan membantu menyertifikatkan sisa lahan warga yang sudah dijadikan jalan raya," kata Suyadnya, seraya menyebutkan, ganti rugi terhadap lahan yang dijadikan jalan raya berkisar Rp 8-20 juta per are, tergantung lokasinya. Suyadnya mendapatkan informasi bahwa sertifikat juga ada di Kantor Camat Manggis. "Sertifikat yang diambil itu asli, kalau nanti sampai hilang, siapa bertanggung jawab. Masyarakat merasa dibodoh-bodohi pemerintah, tujuh tahun mengurus sertifikat tidak tuntas," tegas Suyadnya, seraya mengatakan ada 23 sertifikat. "Kalau luas lahan secara keseluruhan saya kurang jelas tahu, yang jelas sertifikatnya ada 23," imbuh dia. (wan/gup)

Edisi : Sabtu, 1 Agustus 2015

Hal. : 29